

Sistem Pemikiran Filsafat Ilmu Administrasi

Oleh
Petronela Sahetapy

Abstrak

Sistem pemikiran filsafat ilmu administrasi tidak terlepas dari konsep berpikir dan paradigma dalam revolusi sains yang menimbulkan konsep baru dalam perkembangan cara berpikir keilmuan sebagai perwujudan dari logika berpikir rasionalisme dan empirikal dari pengembangan ilmu pengetahuan. Sistem pemikiran filsafat ilmu administrasi membentuk pola pemikiran yang mampu menghasilkan perubahan pikiran dari para pionir ilmu administrasi ke arah pemikiran sistemik dalam berpikir, yakni berpikir holistik, berpikir teoritikal, berpikir menggunakan ilmu, berpikir perubahan, berpikir atas ketidaksetujuan, berpikir dan berlaku etis, pemanfaatan pengetahuan, dan uji ilmu.

Kata Kunci: Sistem Pemikiran, Filsafat, Ilmu Administrasi

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran-pemikiran keilmuan sebagai sebuah pola sistemik terus mengalami perubahan dalam perkembangan manusia dan masyarakat yang merujuk kepada konsep evolusi menunjukkan bahwa evolusi itu berlangsung dalam dua arah, yaitu evolusi khusus dan evolusi umum dalam disiplin keilmuan. Keberlangsungan evolusi khusus untuk mewujudkan variasi melalui penyesuaian bentuk yang ada dengan keadaan sekeliling, muncul bentuk baru yang berbeda dengan bentuk yang lama. Sementara keberlangsungan evolusi umum menekankan pada perbedaan proses menimbulkan satu kemajuan, karena bentuk baru mungkin lebih tinggi kriterianya dari bentuk yang lama (Garna, 1996). Sistem pemikiran ilmu administrasi memandang dan menyesuaikan diri dengan perubahan atau evolusi yang terjadi dengan mengkaji dan mencari pola yang sesuai dan menjurus kepada pembentukan dan perubahan sistem pemikiran yang mampu melahirkan konsep baru dalam sistem pemikiran sebagai wujud dari sebuah evolusi sistemik pemikiran keilmuan administrasi.

Sistem berpikir dalam ilmu administrasi adalah menyadari bahwa segala sesuatu berinteraksi dengan perkara lain di sekelilingnya, meskipun secara formal-prosedural mungkin tidak terkait langsung atau secara spasial berada di luar lingkungan tertentu. Pola sistem berpikir dalam ilmu administrasi lebih menekankan pada kesadaran bahwa segala sesuatu berhubungan dalam satu rangkaian sistem. Cara berfikir seperti berseberangan dengan berfikir fragmented-linear-certesian. Berfikir serba sistem mengkombinasikan antara analitikal (kemampuan mengurai elemen-elemen suatu masalah) dengan synthetical thingking (memadukan elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan). System thingking berbeda dengan systemic thingking. Berfikir sistemik lebih menekankan pada pencarian pola-hubungan (pattern), maka berfikir serba sistem lebih menekankan pada pemahaman bagaimana (how) elemen-elemen itu berhubungan. Dengan pemahaman how tersebut, maka kita dapat menemukan elemen mana yang

memiliki pengaruh vital dan solusi yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Sistem berpikir juga akan membentuk sikap yang sistemik dalam merespon permasalahan (system attitude), yakni suatu pola perilaku yang tidak menabrak aturan main (rule of game) yang sudah disepakati dalam satu sistem tertentu. Sebuah aturan yang ditetapkan dalam sistem memang bersifat membatasi ruang gerak (self constraining), namun pada saat yang sama memungkinkan (self enabling) setiap elemen untuk bekerja sesuai fungsinya dan berinteraksi dengan elemen lain. Jika tidak ada batasan fungsi yang jelas, maka setiap elemen itu akan saling bertabrakan dan malah berpotensi menghancurkan sistem secara keseluruhan. Disinilah pentingnya berfikir dan bertindak serba sistem demi menjaga kesinambungan dari sistem itu sendiri. Perubahan aturan main dimungkinkan dan dapat diperjuangkan melalui cara-cara legal-rasional, sehingga sistem tumbuh semakin sehat dan matang. Dengan cara yang demikian akan terjadi pula keseragaman tindakan secara bijak berdasarkan cara berpikir yang positif dan rasional dan membangun sinergitas kerjasama yang terfokus pada sistem pemikiran administrasi yang terprosedural dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang mampu mengatasi masalah dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kesemuanya itu terwujud dari sistem pemikiran yang menghasilkan kebenaran dan ketepatan pengembangan pemikiran dari pola berpikir yang diterapkan untuk mencapai hasil terbaik yang terarah pada perubahan yang dicitakan dalam pengembangan ilmu administrasi.

B. PEMBAHASAN

Filsafat ilmu pengetahuan memiliki hakekat tertentu dalam upaya menegakkan kebenaran ilmu itu. Pengetahuan yang menjadi ilmu itu adalah ilmiah (scientific) dan objektif (objective). Filsafat yang dibangun dalam sistem pemikiran ilmu administrasi mengacu pada pola pikir secara sistemik dalam bentuk berpikir holistik, berpikir teoritikal, berpikir menggunakan ilmu, berpikir perubahan, berpikir atas ketidaksetujuan, berpikir dan berlaku etis, pemanfaatan pengetahuan, dan uji ilmu. Filsafat pemikiran yang membentuk pola pikir sistemik yang dimaksud merupakan sebuah kerangka bangun yang logik dengan dukungan nalar yang tinggi dalam rangkaian pemikiran ilmu administrasi.

1. Berpikir Holistik

Salah satu ciri khas pemikiran filsafat ilmu administrasi adalah berfikir holistik yaitu cara berpikir yang mencakup keseluruhan atau berorientasi penggambaran yang menyeluruh atau mengutuhkan (tidak terlepas-lepas, atau terpisah-pisah) tentang realitas. Pemikiran secara holistik melekatkan diri pada pendekatan pengetahuan filosofis yang khas sifatnya. Sifat pengetahuan menyeluruh (holistic/integrative) dan mendasar (fundamental) dengan model pemikiran yang analitis, kritis dan spekulatif. Pendekatan holistik berkaitan dengan anggapan yang menekankan pada suatu keseluruhan lebih dari

bagian-bagiannya (seperti pendapat Comte, Spencer Durkheim) sedangkan keseluruhan itu sesuatu yang berbeda dan bersifat berbeda pula. Dalam ilmu administrasi hal itu dipastikan sebagai sesuatu yang berbeda dalam fungsi-fungsinya yang dilihat secara fungsional dari bagian-bagian maupun sub-sub bagian yang mendasari fungsi masing-masing, merupakan suatu keseluruhan dari sistem administrasi yang sekalipun berbeda berdasarkan fungsi masing-masing tetapi berkaitan erat satu dengan yang lainnya dalam memacu kegiatan administrasi. Sistem berpikir dalam ilmu administrasi telah berkembang jauh dan telah menyediakan seperangkat teknik untuk mempelajari sistem secara holistik, sebagai upaya melengkapi metode reduksionis (*reductionistic methods*) yang telah berkembang sebelumnya. Kerangka sistem merupakan dasar penting untuk mempelajari sistem dalam berbagai bentuk. Ia lebih banyak menggunakan pola pikir holistik dibandingkan teknik reduksionis. Di sini dipelajari kaitan-kaitan (*linkages*), interaksi dan proses antara elemen-elemen yang membangun sistem secara keseluruhan. Seorang pemikir sistem, mempertimbangkan bahwa sebuah sistem adalah dinamis dan kompleks, sebagai hasil interaksi dari unit yang terstruktur dan seimbang. Informasi mengalir dari elemen-elemen yang berbeda dalam sistem. Namun ingat juga tentang lingkungan, karena sebuah sistem berada dalam lingkungannya sendiri dan informasi maupun materi masuk dan keluar ke lingkungan tersebut. Batas-batas sistem ditentukan dengan mengukur frekwensi relative interaksi, dimana interaksi internal tiap anggota tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan luar (*antarsistem*). Keakuratan sistem administrasi dalam proses penggerakannya mencerminkan pola hubungan dan kerjasama yang solid dan menyatu dalam sebuah kontrol dan aktivitas yang tidak terlepas dari perhatiannya terhadap tuntutan dan kebutuhan lingkungan internal maupun eksternal.

Setiap sistem mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perkembangan baru dalam cara pandang yang membutuhkan suatu konsekuensi dari proses sistem yang terarah sesuai dengan konsep baru dari pandangan sistem. Konsep sistem dalam administrasi telah berkembang menjadi "teori sistem" (*the systems theory*) yang menggunakan pendekatan interdisiplin untuk mempelajari sistem. Teori sistem dikembangkan oleh Ludwig Von Bertalanffy sejak tahun 1932, menurutnya bahwa dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda-beda muncul problem-problem yang serupa untuk dapat dirumuskan suatu pemecahan-pemecahan identik sehingga pada model yang serupa pun dapat diterapkan. Didukung oleh William Ross Ashby dan lainnya pada dekade 1940-an sampai 1970-an, dengan berbasiskan prinsip-prinsip ilmu fisika, biologi dan teknik. Kemudian termasuk ilmu filsafat, sosiologi, teori organisasi, administrasi,

psikoterapi dan ekonomi. Dua objek yang menjadi focus utama teori system adalah administrasi (complexity) dan kesalinghubungan (interdependence). Teori sistem di dalam sosiologi didalami oleh Nikolas Luhmann. Kita pun mengenal "dinamika sistem" (system dynamics) sebagai bagian dari teori sistem yang mempelajari dinamika perilaku dari system. Dari sini misalnya kemudian lahir teori chaos (chaos theory) dan dinamika sosial (social dynamics). Prinsip dasar teori sistem dalam administrasi cukup sederhana, bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan yang saling tergantung, seperti sebuah mobil kata ahli fisika, atau seperti sebuah organisme dalam bidang biologi. Kelangsungan sistem ditentukan oleh pertukaran masukan dan keluaran dengan lingkungannya. Setiap sistem terbagi sejumlah variable subsistem, dimana setiap subsistem juga terdiri atas tatanan sub-sub sistem yang lebih kecil. Sistem ini tidak terlepas pisahkan satu dengan yang lainnya sebagai sebuah komponen yang menyatu sebagai satu kesatuan yang hidup. Ilmu tentang sistem ini menimbulkan harapan tertentu agar bisa berhasil dalam menghadapi problem-problem yang bukan saja mampu memberikan keyakinan kepada manusia tentang masa depan, tetapi juga memungkinkan manusia untuk mampu mengendalikannya. Ilmu tentang sistem yang berpegang pada teori-teori sistem telah mengalami perkembangan sejak lama (teori sistem telah berumur seratus tahun lebih).

Dalam bidang ilmu administrasi, yang menonjol adalah Davis Easton dan Talcott Parsons. Parsons melahirkan teori sistem yang berkaitan kemudian dengan perspektif "struktural fungsionalis". Dalam pandangan ini, sejumlah kebutuhan harus dipenuhi kalau suatu masyarakat ingin hidup. Kebutuhan tersebut adalah untuk penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola. Oleh sebab itu perlu empat subsistem dalam masyarakat, yaitu ekonomi, politik, kebudayaan dan sosial (melalui keluarga dan sistem pendidikan). Masyarakat berkembang bila terjadi pertukaran yang kompleks diantara subsistem-subsistem. Subsistem politik menghasilkan sumber-sumber, kekuasaan otoritas, yang kemudian melahirkan ekonomi berdasarkan uang. Dengan otoritas yang diperoleh dari negara, ekonomi menciptakan modal, yang pada gilirannya menjalankan politik. Politik ini pun mengarah kepada suatu tindakan perubahan yang mampu melahirkan wajah baru dalam pembangunan pemerintahan negara. Seiring dengan itu, sistem secara luas digunakan dalam ilmu administrasi dalam berbagai pendekatan yang mampu memacu analisis masalah-masalah administrasi. Analisa sistem pada konteks administrasi didasarkan atas penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan setahap demi setahap dari proses, sehingga diketahui bagaimana sistem bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan, dengan membangun kriteria

jalannya sistem agar mencapai optimasi. Dari proses identifikasi sistem dihasilkan spesifikasi yang terperinci tentang perubahan yang menyangkut rancangan dan proses kontrol. Identifikasi sistem ditandai dengan adanya determinasi kriteria jalannya sistem yang akan membantu dalam evaluasi alternatif sistem. Kriteria tersebut meliputi pula penentuan output yang diharapkan dan mungkin juga perhitungan rasio biaya dan manfaat.

Sementara berfikir serba sistem adalah menyadari bahwa segala sesuatu berinteraksi dengan perkara lain disekelilingnya, meskipun secara formal prosedural mungkin tidak terkait langsung atau secara spasial berada di luar lingkungan tertentu. Sistem berpikir lebih menekankan pada kesadaran bahwa segala sesuatu berhubungan dalam satu rangkaian sistem. Cara berfikir seperti berseberangan dengan berfikir fragmented-linear-cartesian. Berfikir serba sistem mengkombinasikan antara analitikal (kemampuan mengurai elemen-elemen suatu masalah) dengan synthetical thinking (memadukan elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan). Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan berpikir tetapi adanya saling keterkaitan yang kuat dalam cara berpikir yang mampu menghasilkan suatu kemajuan berpikir dalam mencapai suatu kemajuan yang didasari oleh sistem kerangka pikir yang sistematis. System thinking sedikit berbeda dengan systemic thinking. Berfikir sistemik lebih menekankan pada pencarian pola-hubungan (pattern), maka berfikir serba sistem lebih menekankan pada pemahaman bagaimana (how) elemen-elemen itu berhubungan. Dengan pemahaman how tersebut, maka kita dapat menemukan elemen mana yang memiliki pengaruh vital dan solusi yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Keefektifan dan ketepatan penyelesaian dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan dalam pemikiran sistemik itulah melahirkan keputusan yang tepat sebagai sebuah penawaran solusi yang mampu mencapai tuntutan dari masalah yang diselesaikan dan menunjukan proses yang sistemik dari pemikiran yang rasional, objektif, dan tepat dalam ilmu administrasi.

2. Berpikir Teoritik

Berpikir teoritik adalah suatu pemikiran yang mengarah kepada suatu landasan berpikir yang menjelaskan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah. Lorens bagus (1996) memberikan penjelasan tentang fakta obyektif yaitu peristiwa, fenomena atau bagian realitas yang merupakan obyek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Dan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta obyektif dalam kesadaran manusia. Fakta ilmiah adalah dasar bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta itu bangunan teoritis mustahil. Fakta

ilmiah tidak terlepas dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta ilmiah yang berbentuk suatu deskripsi ilmiah. Fakta - fakta ilmiah dari ilmu administrasi secara teoritis berpikir mengarah dan menunjukkan pada pengetahuan manusia/masyarakat tentang fakta obyektif administrasi. Bagaimana kita berpikir secara teoritikal administrasi itu sesuai dengan perkembangan, perubahan, dan pergeseran-pergeseran yang terjadi?

Berpikir secara teoritikal ilmu administrasi melandasi secara fundamental filsafat ilmu pengetahuan merupakan tinjauan kritis filsafat administrasi atas problematika hakikat ilmu administrasi baik dari segi antologi, epistemologis, maupun aksiologisnya, yang secara spesifik mengkaji secara kritis hakikat ilmu administrasi, metode ilmiah, sikap etis dalam pengembangan dan komparasi kritis sejarah pengembangan ilmu administrasi. Dalam eksplanasi faktanya juga menuntut penalarannya diberbagai segi konsentrasi administrasi yang didukung oleh pemikiran secara deduktif dan induktif, yang adalah logika berpikir teoritikal secara ilmiah yang salah satu atau keduanya harus tercermin dalam argumentasi ilmiah yang dikemukakan secara sistemik dan terwujud dalam disiplin ilmu administrasi. Secara teoritikal ilmu administrasi yang tidak terlepas dari perkembangan pemikiran dan kehidupan masyarakat, oleh maturana dan Valera, dalam bukunya yang berjudul *Autopoieses and Cognition* (1980). Inilah yang mendasari pemikiran akan sosilogi administrasi yang disusun oleh Kevin Kelly, dalam bukunya *Out of Control* (1955), menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam beberapa disiplin ilmu yang memandang segala sesuatu sebagai sistem kompleks dan sistem yang mengorganisasi sendiri (*self-organizing*); sebuah konsep yang dipinjam dari ilmu alam (fisika dan biologi) dengan adaptasi tertentu dalam penerapannya dalam ilmu administrasi. Analisis yang digunakan adalah analisis trans-disiplin yang mengkaji sistem administrasi sebagai sistem kompleks sehingga dapat diperhatikan berbagai parameter-parameter teknisnya untuk kemudian dengan bantuan matematika dan computer dapat dianalisis secara komputasional dalam bentuk masyarakat buatan (*artificial society*). Dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai sistem adaptif kompleks di mana tiap-tiap agen penyusunnya harus melakukan adaptasi sedemikian rupa untuk dapat tetap bertahan hidup dalam ranah evolusi sosial yang berlangsung terus-menerus.

Ilmu-ilmu administrasi bersandar pada prinsip-prinsip dasar dari sains yang salah satunya adalah refutabilitas atau ia dapat dipersalahkan jika memang salah dalam terminology peningkatan manfaat bagi publik. Melalui berbagai tools yang diakuisis oleh ilmu-ilmu administrasi, hal ini dapat dilakukan dan ilmu sosial yang selama ini menjadi

semakin kaya dan kokoh fondasi keilmiahannya. Michael William yang dikutip oleh Ismaun (2001) menyatakan bahwa fondasi keilmiahannya itu dilandasi dengan teori kebenaran, yakni kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik, dan kebenaran proposisi. Bahkan Muhadjir menambahkan satu teori lagi yaitu kebenaran paradigmatis (Ufi, 2008). Pemikiran teoritis administrasi terfokus pada teori-teori kebenaran sebagai suatu realitas nyata dan bersifat empirical science sebagai bukti konkret yang didukung oleh kaidah-kaidah administrasi yang kuat dan menentukan arah dan pijakan dari ilmu administrasi. Ilmu administrasi berkembang seiring pesatnya teknologi komputasi yang memungkinkan pemodelan sistem-sistem yang rumit dalam real seorang analis dan pengamat. Teknologi komputasi yang mendorong simulasi komputasional telah memberikan tools yang penting bagi pengayaan ilmu sosial yang memungkinkan eksperimen dilakukan secara komputasional (Sawyer, 2003) sehingga banyak kebijakan tidak lagi dilahirkan secara coba-coba atau trial and error. Misalnya, berbagai ide tentang solusi untuk kebijakan bagi kepentingan publik dapat disimulasikan dahulu secara komputasional sebelum menjadi kebijakan publik sehingga kebijakan yang diambil pada akhirnya merupakan kebijakan paling optimum bagi kemaslahatan dalam mengatasi masalah publik.

3. Berpikir Menggunakan Ilmu

Menggunakan ilmu itu tentang bagaimana suatu ilmu itu dipakai dan diterapkan sebagai wujud pengejawantahan dari ilmu itu sendiri berdasarkan kepada kenyataan dan kebenaran dan tidak menimbulkan keraguan dalam tingkatan kepercayaan penerapannya, karena didukung oleh fakta-fakta empirikal sebagai sebuah ilmu. Salah satu hal yang dianggap mengganggu dalam perkembangan administrasi negara adalah masih terdapatnya keragu-raguan tentang apakah administrasi negara itu merupakan suatu ilmu atau belum merupakan ilmu. Sehingga dalam prakteknya administrasi negara itu menggunakan ilmu atau tidak. Pada tahun 1960-an terdapat usaha yang cukup sungguh-sungguh untuk mencoba membuktikan bahwa administrasi negara itu menggunakan ilmu dalam prakteknya. Kesemuanya itu ternyata mempunyai hubungan analisis sistem terhadap studi kehidupan administrasi negara. Dan administrasi Negara itu dikatakan sebagai ilmu dengan membuktikan dukungan filsafat ilmu pengetahuan yang kuat secara metodis, bahwa sesuai filsafat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yaitu jenis pengetahuan yang berciri khusus telah tersusun secara sistematis dan metodis dengan metode ilmiah tertentu. Ilmu adalah pengetahuan (knowledge; kennis) yang disusun secara sistematis dan metodis. (Kantaprawira, 1990).

Dengan perkataan lain, apabila seperangkat pengetahuan dalam bidang tertentu dikaji, disusun, dipilah-pilah dan diamati terus menerus dapat melahirkan teori; dan sejumlah teori itu dapat membentuk tumbuhnya suatu ilmu tertentu. Dengan demikian, seperangkat teori merupakan batang tubuh utama ilmu (*building blocks of science*). Di samping seperangkat teori tadi, di dalam suatu ilmu masih terdapat hal-hal lain, di antaranya adalah (1) hipotesis (pernyataan hubungan antar variable yang perlu dibuktikan), (2) calon teori dan pernyataan yang masih memerlukan pembuktian (teorema), (3) asumsi, (4) premis atau anggapan dasar, (5) postulat, (6) dalil, (7) rumus, (8) formula, (9) aksioma, (10) preposisi, (11) lingkup (objek pengenalan), (12) metodologi atau filsafat ilmu, (13) metode, (14) teknik, (15) konsep, (16) eksplanasi, (17) kriteria, (18) definisi, (19) klasifikasi, (20) sistematika, (21) model, (22) paradigma, (23) aplikasi (penerapan), (24) pernyataan problematic, (25) anomaly (irregularitas), (26) proyeksi, (27) penelitian serta pengembangan, dan (28) prediksi.

Suatu teori lahir melalui dua sumber, yaitu melalui usaha deduktif dan usaha induktif atau penerapan keduanya secara sekaligus (*simultan*). Usaha deduktif melahirkan teori apriori yang sifatnya spekulatif-transendental dan normative serta preskriptif, sedangkan teori yang induktif lahir setelah dikaitkan dengan empiris (pengalaman) dan kenyataan-kenyataan. Akan tetapi dalam proses yang sebenarnya kedua usaha tersebut dipergunakan secara serempak dan bergantian. Suatu hasil deduktif akan ditinggalkan apabila ia tidak sesuai dengan pembuktian (*evidence*), dan demikian juga nasib induksi yang tak bernalar cukup. Pengamatan (*observasi*) dan pengkajian terhadap sejumlah pengetahuan dapat melahirkan kejegagan-kejegagan tertentu. Kejegagan atau keteraturan itu disebut sebagai teori karena teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor dan unsur serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langsung dan terus menerus. Dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara administrasi negara dengan ilmu lainnya, misalnya letak perbedaan berkisar pada penekanan dan pengendalian tinjauannya pada teori-teori (*theoretical emphasis*). Biasanya dalam mendefinisikan administrasi termasuk banyaknya elemen-elemen di antara mereka. Suatu angka tertinggi level tertinggi dalam derajat administrasi. Gell-Mann (1995) menggarisbawahi, ketika mengevaluasi administrasi ke dalam sistem, salah satu elemen akan menjelaskan secara apriori tentang pengamatan sistem dan bahasa yang dia gunakan dalam menjelaskan suatu hal tertentu. pendapat Casti (1994) "... apapun administrasi (termasuk sistem) adalah penggabungan kepemilikan dari suatu sistem dan dapat berinteraksi dengan sistem lainnya, lebih sering

digunakan dalam observasi atau pengendalian... dengan sebenarnya, bagus, indah, baik dan jahat, disatu sisi administrasi terlihat secara kasat mata sebagai pengendali struktur dan perilaku sistem itu sendiri". Hasilnya teori administrasi mengidentifikasi suatu aturan pengamatan dalam proses pengetahuan sistem. Dalam hal ini, teori administrasi lebih dekat ke arah pandangan fenomenologi (phenomenological) yang tidak terlepas juga dari pandangan secara endofiskal.

Seperti Prigogine dan Stengers (1984), Rossler (1986) mendukung pergerakan di dalam pemahaman pengetahuan yang berasal dari kebiasaan, suatu cara pandang "eksofiskal" terhadap alam semesta menjadi suatu "endofiskal". Cara pandang endofiskal dipahami dengan baik oleh konsep Husserl's "kehidupan dunia" (seperti pengetahuan dan bentuk pengetahuan lainnya terikat dalam pengalaman tentang dunia manusia setiap hari) (Makaryk, 1993) Pandangan endofiskal tentang teori administrasi juga menyepakati adanya kritik post-positivistik dalam teknokratis praktis dalam analisis kebijakan (Fischer, 1990). Dalam analisis kebijakan teknokratis, seorang analis kebijakan mempunyai kewenangan peraturan dengan asumsi bahwa mereka mempunyai pengetahuan secara obyektif terhadap realita kebijakan, karena keahlian mereka dibutuhkan. Post positivistic berargumentasi bahwa pengetahuan dari ahli endofiskal, seperti pengetahuan tentang masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Dan analisis kebijakan dalam lingkup administrasi itu dilakukan secara restrospektif dan prespektif yang melahirkan gambaran dan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pada sebuah kebijakan dalam memenuhi kepentingan publik.

4. Berpikir Perubahan

Perubahan mendatangkan pengaruh yang sangat besar dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dan menembus setiap lapisan masyarakat dan dunia ilmu maupun teknologi, yang sekaligus merubah cara berpikir manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian berarti bahwa manusia perlu senantiasa "berubah" sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Perubahan yang dimaksud meliputi misalnya perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai, penilaian perubahan dalam metode dan cara-cara bekerja, perubahan dalam peralatan yang digunakan, perubahan dalam cara berfikir, dan perubahan dalam hal bersikap. Singkat kata, manusia perlu senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan perubahan. Perubahan dapat terjadi secara evolusioner, tetapi ia pula dapat berlangsung secara revolusioner. Perlu diingatkan bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik, hingga dalam hal demikian tentu perlu agar diupayakan agar bila

dimungkinkan perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan demikian dapat kita mengatakan lagi bahwa perubahan senantiasa mengandung makna, beralihnya keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after condition). Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu proses transformasi, yang tidak selalu berlangsung dengan lancarnya, mengingat bahwa perubahan-perubahan seringkali disertai aneka macam konflik yang muncul.

Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah "mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relative cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin". Pembahasan perubahan dan proses perubahan biasanya dilakukan orang melalui fokus perubahan keorganisasian. Keharusan melakukan perubahan dewasa ini dalam lingkungan yang pernah turbulensi dan dinamika, merupakan sebuah fakta kehidupan bagi kebanyakan organisasi-organisasi dewasa ini tidak boleh menunggu hingga mereka melaksanakan perubahan-perubahan; mereka secara terus menerus perlu memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan akan perubahan. Ada berbagai macam alasan mengapa organisasi-organisasi berubah, dan banyak terdapat tipe perubahan yang dapat dilaksanakan mereka seperti misalnya perubahan yang timbul karena kegiatan restrukturisasi, reengineering dan e-engineering, inovasi dan total quality management. Dalam konteks perubahan yang demikian cepat maka cara berpikir ke arah perubahan bahwa pembangunan akan semakin kompleks yang menuntut kecepatan, ketepatan sasaran atau tujuan, serta profesionalisme pengabdian para pelakunya. Aspek lain yang tidak bisa dipisahkan adalah bahwa para pelaku pembangunan dituntut untuk lebih menghargai rasa kemanusiaan dan humanisme yang tinggi sehingga dapat dihindari penolakan-penolakan kebijakan oleh masyarakat (public veto) (Pudjosukanto, 1997). Pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat industri yang maju dan mandiri dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek budaya bangsa sebagai dua aspek yang menunjang bagi keberhasilan pembangunan. Aspek iptek menyangkut proses kreativitas SDM menghasilkan produk tertentu sesuai selera dan daya beli masyarakat, sedangkan aspek budaya menyangkut berbagai aspek budaya yang dimiliki guna mendukung proses pembangunan.

5. Berpikir Atas Ketidak Setujuan

Dalam setiap pola pemikiran tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dalam memandang dan menganalisis suatu objek yang menjadi sorotan atau fokus

perwujudan di tingkat ilmu pengetahuan. Pengakuan dan penolakan terhadap sesuatu konsep, teori, postulat, dan dalil-dalil tentunya didukung dengan sistem pemikiran yang logik dan rasional. Sistem berpikir selain diagung-agungkan ada juga yang menolak dan memberikan kritikan. Kesemuanya itu berkenaan dengan masalah penerapan sistem berpikir tersebut. Mereka yang tidak setuju dan mengkritik sistem thinking ini antara lain beranjak dari pernyataan bahwa "fungsi itu universal sifatnya, yaitu setiap masyarakat menjalankan fungsi itu kendati melalui struktur yang berbeda", artinya fungsi selalu serbahadir dalam struktur apapun. Kemudian, menurut para pengkritik tersebut dalam mengkaji fungsi adaptasi (masalah ekonomi) secara lintas kultural (crosscultural basis), kita dapat menemukan beberapa subsistem dalam administrasi negara yang cenderung menerima perencanaan ekonomi, misalnya, sementara subsistem lainnya menolak. Hal ini akan merupakan bantuan maupun hambatan dilihat dari kerangka fungsi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan administrasi negara yang bersangkutan. Kelemhan hasil kajian lintas kultural ini muncul karena pendekatan sistem ini tidak secara cukup bergaul dengan lapisan perilaku di dalam dunia empirik.

Demikian pula dalam buku Jujun S. Suriasumantri "System Thinking", kita dapat melihat betapa gencarnya kritik terhadap cara berfikir sistem ini. Diantaranya sejumlah sarjana yang secara tajam mengkritik, patut dicatat apa yang diutarakan oleh D. C Philips sebagai kritik yang lebih substansial sifatnya. Menurut Philips, cara berfikir itu sistem kurang mempunyai historisisme (lacking historicisme) dan tidak mempunyai kemampuan prediktif. C. West Churchman, sebagai tokoh terkemuka System Thinking, mengatakan antara lain bahwa mereka yang tidak setuju terhadap sistem pemikiran itu percaya bahwa usaha merencanakan masa depan secara rasional itu berbahaya. Dengan demikian, diantara para pengkritik itupun tidak semuanya berselaras karena justru ternyata pendekatan sistem melalui usaha perencanaan itu sejauh-jauhnya ingin menyusun masa depan secara lebih pasti melalui unsur prediktifnya.

Disamping itu sesuai dengan perubahan dan tingkat kebutuhan pengetahuan yang semakin meningkat dengan strategi-strategi pengembangan dalam ilmu administrasi menuntut suatu pola sistem pemikiran yang mampu menjawab tuntutan kebutuhan itu. Dimana saat ini telah terjadi perubahan yang mengarah kepada sistem berpikir sesuai dengan paradigma baru administrasi negara, yakni good governance yang mentransformasikan variabel-variabel yang mampu mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan menjurus kepada pelayanan prima yang berkualitas terhadap masyarakat. Konsep sistem berpikir ini juga dirancang secara sistematis untuk melahirkan sinergitas

sistem dalam administrasi negara sehingga tidak akan menimbulkan penolakan terhadap sistem berpikir dalam waktu yang terlalu cepat, yakni apabila sistem pemikiran itu mampu memecahkan persoalan-persoalan dan mewujudkan tingkat pelaksanaan dan kinerja aparatur negara yang baik dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka sistem pemikiran itu tidak akan mengalami suatu penolakan atau ketidaksetujuan dalam waktu yang singkat.

6. Berpikir dan Berlaku Etis

Setiap manusia (individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat) selalu menginginkan cara-cara berpikir dan berlaku etis dalam tatanan kehidupan sosial yang teratur dan menganut nilai-nilai yang mengatur jalannya proses hubungan manusia dalam hidupnya maupun dalam ilmu pengetahuannya, yakni nilai keindahan, kesenian, kebaikan, etis-moral. Maka manusia berpikir secara etis, yaitu berpikir filsafati tentang hal yang baik dan yang buruk menurut tolak ukur etis moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses berfikir dan bertindak di bidang administrasi adalah dasar bangunannya, yaitu pemikiran ilmiah dan kemahiran bertindak dalam aktivitas administrasi. Pemikiran yang didasari argumentasi logis para ilmuwan administrasi berpangkal dari premis sampai melahirkan suatu kesimpulan. Namun demikian tetap ada perbedaan cara melahirkan pangkal fikir dari ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lainnya. Perbedaan fokus pangkal pikir manusia ada yang mengawali dari pangkal pikir deduksi, induksi, dan ada pula yang memulai dari abduksi. Pangkal pikir diawali dengan deduksi merupakan argumentasi yang probabilitasnya sudah pasti dan tidak dapat di tawar-tawar lagi, berbeda dengan pangkal pikir induksi yang argumentasinya kemudian hubungan premis dan kesimpulan. Sedangkan pangkal pikir abduksi merupakan argumentasi yang sifatnya moderat dengan berorientasi kepada rasionalitas terhadap sanggahan-sanggahan argumentasi etika tumbuh dari pengalaman manusia yang disimpan sebagai pengetahuan tentang hubungan antara dirinya dengan orang lain dan bagaimana mengatur ataupun menata hubungan tersebut, pengetahuan itu diberi makna menurut kesepakatan sosial sehingga berfungsi sebagai acuan bagaimana dilakukan aktifitas kehidupan. Manakala etika itu menjadi acuan bagi masyarakat dalam berhubungan satu sama lainnya, maka acuan itu menentukan tolak ukur akan moralitas warga masyarakat tersebut tersebut dalam alur kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari tinjauan itu, etika tidaklah berdiri sendiri atau terlepas dari berbagai pertimbangan lainnya, tetapi sebagai dan merupakan sejumlah konsep yang bermakna atau berfungsi, yang tergantung pada aspek kehidupan apa yang

dilakukan seseorang itu. Demikian pula halnya dalam berbagai aktifitas ilmiah, etika itu penting sekali yang dapat terpecah menurut disiplin atau sub-disiplin ilmu pengetahuan memiliki etikanya.

Berpikir ilmiah adalah berkaitan dengan kesengajaan, karena itu orang harus bertanggung jawab terhadap kerangka fikiran dan tindakannya yang disengaja dilakukan berdasarkan pada pemikiran ilmu tertentu. Keadaan itu mengandung arti bahwa seseorang yang berpikir menurut ilmu tertentu harus dapat mengemukakan secara jujur kepada kata hatinya, yang menurut kata hati mengarahkan bahasanya tindakannya itu adalah perbuatan yang baik dan yang seharusnya dilakukan. Tanggung jawab semacam itu juga harus diberikan kepada orang lain yang bidang ilmunya sama atau lain, ataupun yang pada dasarnya adalah sama bahwa apa yang difikir dan dilakukannya adalah hal yang baik. Apabila etika itu berarti adapt kebiasaan, sedangkan adapt kebiasaan adalah kebudayaan, maka etika berada di belakang atau terlengkap dalam konsep kebudayaan. Bagaimana posisi bahwasanya suatu atau sejumlah adapt akan menentukan isi etika pada posisi dimana dalam alur perkembangan adapt kebiasaan atau kebudayaan (apakah menjadi kebiasaan, aturan atautkah hukum). Kebiasaan manusia itu berkembang menurut kebutuhannya karena itu derajat sanksinya juga berbeda satu sama lainnya, yaitu antara folkways dengan mores – custom – laws. Kecuali laws (hukum) dan norms (norma); maka kata-kata folkways, mores, customs diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adapt istiadat atau kebiasaan. Walaupun mores bisa pula diterjemahkan ke dalam moral atau suatu perbuatan yang tak bermoral. Setiap unsur etika dapat diterangkan secara bermakna atau bisa mengkoordinasikan ungkapan-ungkapan pengalaman secara etis dalam wacana-wacana umum, dalam lembaga-lembaga sosial, dalam aktivitas, dalam prinsip yang mendasari beragam ilmu, dengan mencoba menerangi unsur-unsur yang selaras dan menunjuk hal-hal yang tidak sesuai satu sama lain.

Dengan memahami dan menerapkan etika seseorang akan lebih menunjukkan adabannya dalam tindakan-tindakan, pemikiran, dan perilaku secara etis. Pada dasarnya juga berpikir dan berperilaku etis berpedoman kepada etika umum atau etika dasar yang mengkaji tentang prinsip-prinsip moral dasar yakni prinsip kebaikan, keadilan, dan hormat pada diri sendiri sebagai subyek moral; juga tentang fenomena hati nurani, kebebasan, kehendak dan tanggung jawab moral. Disamping itu mengacu kepada etika khusus atau etika terapan yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip moral dasar pada

kasus atau masalah etis moral dalam bidang tertentu, seperti etika sosial, etika hukum, dan etika politik, dst. (Suseno, 2001; Bertens, 2003).

7. Pemanfaatan Pengetahuan

Pemanfaatan pengetahuan mendasari dan terkait dengan kualifikasi masyarakat yang maju dan mandiri yang mampu memanfaatkan pengetahuan sebagai dasar pijak membangun kemajuan diri dalam pembangunan. Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang mampu mengurus dirinya sendiri (swadiri), membiayai keperluan sendiri (swadana), dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (swasembada). Ini tujuan hakiki dari pemanfaatan pengetahuan dalam menunjang pembangunan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengadaptasi dan mengadopsi secara efektif tanda-tanda kemajuan, untuk kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap strategi perencanaan pembangunan yang diandalkan, serta berorientasi kepada profesionalisme aparatur, efisiensi ketatalaksanaan organisasi, dan peningkatan kinerja pelayanan publik di segala bidang. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem administrasi pemerintahan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan akuntabel disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan a-government. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaruan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar (learning community), mengacu kepada terwujudnya Manusia yang berdaya saing tinggi.

Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (1) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (2) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (3) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif, (4) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika professional, (5) memiliki daya tanggap dan

sikap bertanggung gugat, (6) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan dan (7) memaksimalkan efisiensi, kualitas dan produktivitas.

Sementara itu untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu dijamin perkembangan kreativitas dan oto-aktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa. Dalam rangka itu, reformasi sistem birokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah-daerah, juga perlu diperhatikan antara lain prinsip-prinsip pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, transparansi, konsistensi kebijakan, kepastian hukum dan akuntabilitas. Disamping itu berpegang pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara (Soeharyo dan Effendy, 2003), yaitu mencakup asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas.

8. Uji Ilmu

Pengujian ilmu mengarah pada uji penalaran dengan melihat data sebagai fakta karena itu seseorang yang menalar akan perlu memiliki pengetahuan tentang data. Data yang bersumber dari konsep-konsep itu juga perlulah dipilih sesuai dengan keperluan ataupun dipilah-pilah menurut kriteria tertentu, agar dapat dipahami melalui analisis yang dilakukan. Pengujian ilmu dapat ditelusuri pula dengan penalaran deduktif dilakukan atas pertimbangan dan dasar menurut prinsip tertentu, kaidah ataupun teori yang berlaku umum kepada sesuatu yang khusus, karena itu pula deduksi tidak dapat menghasilkan kaidah yang baru atau pun terobosan yang penting dalam ilmu pengetahuan. Upaya penalaran deduktif dengan menarik kesimpulan adalah didasarkan pada premis, yaitu pernyataan dasar, yang memberi simpulannya sebagaimana terkandung dalam premis tersebut (ada premis mayor dan ada premis minor) (Garna,2008). Kesimpulan yang dicapai dengan penalaran deduktif sudah dibatasi pada kaidah awalnya yang dengan demikian simpulan itu adalah benar selama kaidah yang digunakan itu benar. Ada dua jenis cara dalam menarik kesimpulan dengan penalaran deduktif, yaitu : (1) menarik kesimpulan langsung dari satu premis yang dilakukan melalui konversi (perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, obversi (metode berpikir langsung untuk mencari kebenaran baru berdasarkan keputusan yang telah ada), dan kontraposisi, (perbedaan posisi dalam menarik simpulan dari satu premis; (2) menarik simpulan tak langsung, dengan cara silogisme (kategorikal, hipotesis, dan alternatif), dan eminen,

nyata atau unggul. Dengan demikian melalui pengujian ilmu, suatu teori lahir melalui dua sumber, yaitu melalui usaha deduktif dan usaha induktif atau penerapan keduanya secara sekaligus (simultan). Usaha deduktif melahirkan teori apriori yang sifatnya spekulatif-transendental dan normatif serta preskriptif, sedangkan teori yang induktif lahir setelah dikaitkan dengan empiris (pengalaman) dan kenyataan-kenyataan. Akan tetapi dalam proses yang sebenarnya kedua usaha tersebut dipergunakan secara serempak dan bergantian. Suatu hasil deduktif akan ditinggalkan apabila ia tidak sesuai dengan pembuktian (evidence), dan demikian juga nasib induksi yang tak bernalar cukup.

Pengamatan (observasi) dan pengkajian terhadap sejumlah pengetahuan dapat melahirkan keajegan-keajegan tertentu. Keajegan atau keteraturan itu disebut sebagai teori karena teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor dan unsur serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langsung dan terus menerus. Beberapa syarat ilmu diantaranya adalah dapat diuji, dites atau dibuktikan (testable, verifiable), mempunyai sifat sistematis dan berlaku umum (general). Apabila kita amati, di dalam ilmu-ilmu alamiah sudah sejak lama terlihat adanya dalil-dalil yang sifatnya general dan universal, artinya terdapat teori atau cara yang sama untuk meninjau fenomena apapun. Kenyataan lain, di dalam ilmu-ilmu sosial belum menghasilkan sesuatu yang memadai dalam rangka usaha untuk memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu tersebut di atas. Kejadian-kejadian sosial, dilihat dari segi sifat indeterminisme manusia, hampir tidak mungkin di tes, apalagi di tes ulang. Kemudian disana-sini ilmu sosial belum memperlihatkan ciri sistematis, apalagi universal. Dalam objek dan lingkup ilmu-ilmu sosial jarang memperlihatkan ciri sistematis, apalagi universal. Dalam objek dan lingkup ilmu-ilmu sosial jarang sekali terlihat proses-proses dan hasil-hasil yang "sama" kendati faktor-faktor yang berinteraksinya relatif "sama". Dengan demikian, para ahli ilmu administrasi, misalnya mengidamkan adanya suatu cara yang sama untuk mengkaji fenomena administrasi yang berlangsung dimanapun. Hal ini mengandung arti adanya konsekuensi bahwa analisis untuk bidang tertentu akan sama. Ilmu administrasi dan manajemen lahir sebagai seni merupakan wujud dari hasil pengujian ilmu yang telah di uji secara sistemik dan dilandasi dengan pemikiran filsafati analogi, epistemologi, dan aksiologi.

Dihubungkan dengan fungsi suatu ilmu yang setidaknya bermula dari tugas untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai gejala yang diamati, dalam perkembangannya kemudian ia menjadi lebih canggih, yaitu berupaya menerangkan sebab akibat dan memberikan argument logis serta memberikan eksplanasi tentang

berbagai gejala atau kejadian. Lebih meningkat, fungsi ilmu tidak berhenti pada soal menerangkan saja, tetapi menginjak lahan yang lebih jauh lagi, yakni bersifat menilai dan memberikan evaluasi serta di sana sini mulai mencoba mengeluarkan prediksi. Pendek kata, fungsi ilmu itu adalah (1) deskripsi, (2) eksplanasi, dan (3) evaluasi-prediksi. Apabila teori itu merupakan batang tubuh atau substansi utama suatu ilmu, maka tidak bisa lain fungsi teori itu pun tidak jauh dari fungsi ilmunya. Kemudian, apapun hasil yang diwujudkan oleh suatu ilmu menurut perkembangan masing-masing, kita dapat melihat tingkat-tingkat kemajuan ilmu yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, hal tersebut menyangkut pula tingkat keandalan teorinya. Di dalam ilmu-ilmu alamiah, hasil aktivitas pengamatan akan peristiwa dan pengalaman empiris itu, setelah disusun dan diabstraksikan (disaring) akan dapat melahirkan teori dan generalisasi berupa dalil-dalil yang sifatnya universal dalam arti hamper-hampir tidak terikat oleh tempat dan waktu. Hal inilah yang merupakan kebanggaan dan arogansi para ahli ilmu-ilmu alamiah, yaitu memiliki sesuatu yang tidak dipunyai oleh para ilmuwan sosial.

Sedemikian eksplisitnya teori dan dalil-dalil dalam ilmu-ilmu alamiah sehingga teori yang satu dapat digulingkan daya lakunya oleh teori yang baru, dan sekaligus memberi arti bahwa teori yang mutakhirlah yang diakui dan karenanya berlaku hukum kehematan (parsimony) atau Occam's razor. Teori yang satu tidak bertumpuk dengan teori lainnya seperti halnya dalam ilmu-ilmu sosial. Seperti diketahui, teori-teori dalam ilmu sosial itu akumulatif. Boleh dikatakan tidak ada teori yang secara mutlak tersisihkan oleh teori lainnya, tetapi suatu teori menjadi klasik, tertinggal dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian ia tetap tidak dapat dikatakan sebagai tidak berlaku lagi. Di dalam ilmu-ilmu sosial, teori general hampir-hampir sukar ditemukan atau langka, apabila tidak dikatakan tidak ada. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat perilaku dan interaksi manusia sebagai pelaku utamanya sangat bermacam ragam. Boleh dikatakan teori-teori general dalam arti teori-teori luas, teori-teori sayap lebar, teori-teori payung atau teori-teori besar itu lebih mungkin terwujud dengan mempergunakan kegiatan deduktif-teoritis. Melalui kegiatan berfilsafat dalam arti mencoba mencari apa-apa yang mendekati kebenaran, manusia mencari apa-apa yang dianggap ideal, etis, baik, sempurna, benar dan sifat-sifat lainnya atas dasar penilaian (value judgement) menurut faktor-faktor moral dan etis serta normative. Jadi, intinya ilmu yang dapat dilakukan pengujian atau pengetesan adalah ilmu-ilmu alamiah, sedangkan ilmu-ilmu sosial dilihat dari segi sifat indeterminisme manusia, hampir tidak mungkin di tes, apalagi di tes ulang dan mendasari bahwa ilmu pengetahuan sosial yang meliputi ilmu pengetahuan

administrasi terdiri dari dua bagian penting, yaitu teoritik dan empirik. Bagian teoritik menunjuk kepada skema konseptual misalnya kaidah, generalisasi, dan teori. Sedangkan bagian empirik ialah fakta-fakta yang dikumpulkan dalam bentuk deskripsi, kajian kasus dan umum serta laporan statistik.

C. PENUTUP

Sistem pemikiran filsafat ilmu administrasi dalam kerangka berpikir secara holistik menekankan pada pendekatan pengetahuan filosofis yang memandang ilmu administrasi secara keseluruhan dan mendasar sebagai model pengembangan berpikir secara teoritik dalam menganalisis ilmu administrasi yang berkembang. Berpikir teoritik dalam sistem pemikiran ilmu administrasi merupakan suatu pemikiran yang dijadikan landasan berpikir dalam menggambarkan dan menjelaskan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah pengembangan ilmu administrasi.

Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa berpikir secara teoritik ilmu administrasi melandasi secara fundamental filsafat ilmu pengetahuan merupakan tinjauan kritis filsafat administrasi yang secara spesifik mengkaji secara kritis hakikat ilmu administrasi, metode ilmiah, sikap etis dalam pengembangan dan komparasi kritis sejarah pengembangan ilmu administrasi. Disamping itu dalam menggunakan ilmu, terfokus tentang bagaimana ilmu administrasi itu dipakai dan diterapkan sebagai pengamalan ilmu berdasarkan kenyataan dan kebenaran yang memiliki tingkatan kepercayaan yang tinggi, dengan didukung oleh fakta-fakta empirikal penelitian ilmu administrasi. Penggunaan ilmu administrasi dalam penerapan sejalan dengan perkembangan yang terjadi sebagai sebuah proses evolusi yang menuju ke arah yang lebih baik.

Pola pemikiran yang sistemik dalam ilmu administrasi sesuai dengan perubahan yang ditujukan tidak terlepas dari pengaruh atas perbedaan pandangan dalam memandang dan menganalisis suatu objek yang menjadi sorotan atau fokus perwujudan di tingkat ilmu administrasi. Pengakuan dan penolakan terhadap sesuatu konsep, teori, postulat, dan dalil-dalil dalam ilmu administrasi melewati proses pemikiran yang logik, rasional, dan ilmiah. Itulah sistem berpikir yang menerima atau menolak dan memberikan kritikan berkenaan dengan masalah administrasi dalam konsep ilmu dan realita.

Pemikiran yang terarah dalam penerapan ilmu administrasi tidak terlepas dari bagaimana pionir ilmu administrasi berpikir dan berlaku etis mewujudkannya sesuai dengan nilai-nilai dalam pemikiran ilmiah dan praktik administrasi yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang diwujudkan secara profesional sebagai instrumen yang ampuh dalam ketatalaksanaan pelayanan yang berkualitas secara organisatoris dan memiliki daya saing keilmuan dalam bidang ilmu administrasi dan ditindaklanjuti dengan penguatan yang inovatif melalui pengujian ilmu yang mengarah pada uji penalaran berdasarkan data sebagai fakta konkrit yang dapat menghasilkan konsep baru sebagai terobosan penting yang adalah bagian yang diutamakan dari proses revolusi pengetahuan dalam pengembangan ilmu administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Gogtug, Marcol, 2006, *News Sciences for Public Administration and Public Connections And Reflections*. Pennyslavenia: VA Chatelaine Press.

- Kristiadi, J.B., 1997, *Dimensi-dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : STIA LAN Press.
- Gleick, J. 1987, *Chaos: Making A New Science*, Viking.
- Ufi, Josep, Antonius, 2008, *Traktat Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Cahaya Pinelang.
- Garna, Judistira, K., 1996, *Ilmu-ilmu Sosial ; Dasar - Konsep - Posisi*, Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- , 2006, *Filsafat Ilmu*, Bandung : Primako Akademika Judistira Garna Foundation.
- Salamon, Suharyo dan Nasri, Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : LAN RI.
- Suriasumantri, Jujun S., 1981, *Systems Thingking*, Bandung : Binacipta.
- Kantaparawira, Rusadi, 1990, *Pendekatan System dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Bandung: Sinar Baru.
- Sabatier, Paul A, 1999, *The Need for Better Theories*. Boulder: CO Westview.